

BAB III

PEMBAHASAN

Pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah kali ini, hanya ada dua pasangan yang akan bersaing memperebutkan kursi gubernur dan wakilnya. Dua tokoh yang berkompetisi sebagai calon pemimpin Jawa Tengah bukanlah wajah baru di panggung politik. Ganjar Pranowo kembali maju pada Pemilihan Gubernur periode ini. Sebagai calon petahana, Ganjar dipasangkan dengan Taj Yasin Maimun atau Gus Yasin anak dari pengasuh Pondok Pesantren Sarang, Rembang, KH Maimun Zubair. Pasangan Ganjar Yasin maju dengan dukungan PDI Perjuangan, Nasdem, Partai Demokrat, PPP, dan Golkar. Lawannya, Sudirman Said, mantan Menteri ESDM 2014-2016, didampingi Ida Fauziyah yang merupakan anggota DPR dari PKB. Pasangan ini diusung oleh koalisi Gerindra, PKB, PKS, dan PAN.

1.1 Faktor faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat kabupaten Blora pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2018

Partisipasi politik adalah salah satu aktifitas yang dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. dari pendapat yang dikemukakan oleh Ramlan Surbakti, ia menyebutkan bahwa ada dua variabel yang dapat mempengaruhi tingkat tinggi rendahnya angka keikutsertaan masyarakat dalam politik itu sendiri. Yang pertama dapat dilihat dari aspek kesadaran politik masyarakat, dimana kesadaran masyarakat terkait pemilihan umum menjadi kesadaran hak atau merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh warga negara. Kemudian yang kedua yaitu

berkaitan dengan pola penilaian dan bentuk apresiasi masyarakat dengan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, dan bagaimana apresiasi masyarakat terkait dengan pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Ada pulafaktor yang mempengaruhi partisi masyarakat dan faktor ini merupakan faktor independen atau berdiri sendiri. Hal ini dapat diartikan sebagai bentuk bahwa kedua faktor yang telah disebutkan diatas dapat dipengaruhi oleh faktor lain, diantaranya yaitu faktor status sosial masyarakat, hubungan antara politik orang tua dengan politik orang muda, kemudian faktor pengalaman dalam organisasi. Status sosial merupakan bentuk kepemilikan orang terhadap kedudukan yang dimiliki, bisa diperoleh dari garis keturunan, tingkat pendidikan, dan pekerjaan.

Status ekonomi juga dapat mempengaruhi tingkat partisipasi politik, dimana status ekonomi yang dimaksud adalah kedudukan seseorang didalam masyarakat baik dilihat dari kekayaan, dan apapun yang dimilikinya. Apabila masyarakat memiliki kesadaran ataupun pengetahuan politik, kemudian diimbangi dengan status ekonomi dan sosial yang baik, maka masyarakat dengan sendirinya akan memiliki minat yang baik terhadap partisipasi politik.

Kemudian menurut Meyson Weymer,, keikutsertaan masyarakat dalam politik juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu

1) Modernisasi

Yang dimaksud dengan modernisasi adalah pembaruan di segala bidang yang berbanding lurus dengan kemajuan teknologi dan perkembangan media massa.

2) Terjadi perubahan struktur kelas sosial

Munculnya kelas kelas baru sebagai akibat dari industrialisasi di kelas menengah dan kelas pekerja dan tidak lepas dari modernisasi.

3) Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi di massa modern.

Adanya Ide ide yang baru seperti, liberalisme, yang dapat membangkitkan tuntutan-tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan suara.

4) Adanya konflik diantara pemimpin-pemimpin politik.

Dalam memperebutkan dan mencari massa, pemimpin politik selalu bersaing untuk mencapai suatu kemenangan.

5) adanya keikutserataan pemerintah yang semakin luas dalam unsur ekonomi, sosial dan budaya

Pengaruh dari keputusan yang dibuat oleh pemerintah seringkali menumbuhkan rangsangan dari organisasi sosial dan mereka selalu melakukan tuntutan.

Pertama, dalam kasus partisipasi politik di Kabupaten Blora, terkait dengan perangsang politik, bahwa masyarakat dapat dipengaruhi dari adanya hubungan antar individu, kemudian adanya hubungan dalam organisasi sosial maupun politik yang nantinya dapat merangsang kepekaan seseorang terhadap politik. Media massa juga sedikit banyak telah mempengaruhi masyarakat dalam kegiatan berpolitik.

Kedua, partisipasi seseorang dapat dikaitkan dengan tingkat sosial yang melekat di dalam diri atau individu. Tingkat kemampuan seseorang di dalam masyarakat menjadi salah satu faktor yang mendukung partisipasi politik itu sendiri. Di dalam masyarakat adat atau masyarakat suku, semakin tinggi tingkatan seseorang, maka hal ini juga cukup berpengaruh.

Ketiga, lingkungan tempat tinggal masyarakat juga cukup mempengaruhi partisipasi masyarakat, hal ini disebabkan karena sistem yang dipakai oleh partai politik sedikit banyak akan membuat masyarakat nantinya dapat tertarik dengan politik atau bahkan tidak tertarik dengan politik. Negara yang menganut sistem demokrasi akan membuat partai politiknya mencari berbagai macam bentuk dukungan dari masyarakat sehingga dapat meningkatkan partisipasi politik.

Keempat, jika dilihat dari perbedaan regional, hal ini akan menimbulkan watak yang berbeda antar individu, kemudian tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh tempat tinggal yang masyarakat tinggali. Hal ini juga akan mendorong perbedaan perilaku masyarakat yang berhubungan dengan perbedaan pilihan dalam berpolitik. Ada yang suka dengan partai A, ada yang suka partai B, ada yang tidak suka partai C, dan seterusnya.

Perolehan suara di setiap daerah di Kabupaten Blora

Tabel 1

no	kecamatan	Jumlah golput pilkada 2015	Prosentase Golput pilkada 2015	Jumlah golput pilgub 2018	Golput pilgub 2018
1	BLORA	19.299	26%	23659	33%
2	JEPON	12.064	25%	17194	35%
3	BOGOREJO	5.046	25%	7245	36%
4	BANJAREJO	13.677	28%	19558	41%

Dari penjelasan tabel diatas, berdasarkan data yang diperoleh dari KPU Kabupaten Blora, secara kuantitatif partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur lebih rendah dibandingkan pemilihan bupati pada tahun 2015. Partisipasi masyarakat pada pemilihan bupati dan wakil bupati lebih tinggi dibanding dengan partisipasi di pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Di kecamatan Blora sendiri pada pemilihan bupati dan wakil bupati mencapai 74%, dan masyarakat yang tidak hadir ke TPS mencapai 26%. Akan tetapi pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilih yg berpartisipasi lebih rendah, hanya sekitar 67% dan masyarakat yang tidak datang ke TPS mencapai 33%. Kemudian di kecamatan Jepon, partisipasi masyarakat pada pemilihan bupati yakni sekitar 75% dan masyarakat yang golput sebanyak 25%. Pada pemilihan gubernur ini, pemilih yang berpartisipasi sebesar 65% dan yang memilih untuk tidak datang sebesar 35%.

Di kecamatan Bogorejo, pemilih pada pemilihan bupati yaitu sebesar 75% dan yang tidak datang ke TPS mencapai 25%. Pada pemilihan gubernur dan wakil

gubernur, pemilih mencapai 64% dan yang memilih untuk golput sebesar 36%. Kemudian di kecamatan Banjarejo, pemilih yang berpartisipasi dalam pilkada mencapai 72% dan yang memilih untuk golput sebesar 28%. Kemudian pada pemilihan gubernur, yang memilih datang ke TPS mencapai 59% dan yang memilih golput sebesar 41%. Dari penjelasan diatas, pemilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015 lebih tinggi dibandingkan dengan pemilih di pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2018.

Dari penjelasan tabel diatas, berdasarkan data yang diperoleh dari KPU Kabupaten Blora, secara kuantitatif partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur lebih rendah dibandingkan pemilihan bupati pada tahun 2015. Di kecamatan Blora sendiri, jumlah angka golput pada pilkada sebesar 19.299 dan pada pemilihan gubernur masyarakat yang memilih golput mencapai 23.659 suara. Di kecamatan Jepon, angka golput pilkada tahun 2015 mencapai 12.064 dan pada saat pemilihan gubernur angka golput jauh lebih tinggi yaitu sebanyak 17.194 suara. Kecamatan Bogorejo angka golput pada saat pilkada sebanyak 5.046 suara, dan pada saat pilgub angka golput juga masih tinggi yaitu sebesar 7245 suara. Kecamatan banjarejo memiliki perbedaan yang sangat besar dimana pada saat pilkada angka golput sebesar 13.667 dan pada saat pilgub mencapai 19.558.

Tabel 2

no	kecamatan	Jumlah golput pilkada 2015	Prosentase Golput pilkada 2015	Jumlah golput pilgub 2018	Golput pilgub 2018
1	TUNJUNGAN	9.099	25%	14944	41%
2	CEPU	18.200	31%	19176	34%
3	JIKEN	8.996	29%	12565	40%
4	SAMBONG	8.164	34%	8417	37%

Dari tabel diatas, di kecamatan tunjungan pemilih pada pemilihan bupati dan wakil bupati mencapai 75% dan masyarakat yang memilih untuk golput sebesar 25%. Kemudian pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur hanya 59% dan pemilih yang tidak hadir ke TPS sebesar 41%. Berbeda dengan kecamatan Cepu, pemilih di pilkada 2015 hanya sebesar 69% dan pemilih yang golput mencapai 31%. Kemudian pada pemilihan gubernur, partisipasi masyarakat mencapai 66% dan masyarakat yang golput tetap lebih tinggi dari pilkada 2015, yaitu sebesar 34%. Kemudian pada pemilihan bupati tahun 2015, di kecamatan Jiken partisipasi masyarakat yakni sebesar 71% dan prosentase pemilih yang golput sebesar 29%. Untuk pemilihan gubernurnya sendiri, partisipasi masyarakat mencapai 60% dan masyarakat yang golput mencapai 40%. Kemudian di kecamatan Sambong, partisipasi pemilih di pemilihan bupati mencapai 66% dan masyarakat yang memilih golput yakni sebesar 34%. Untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, partisipasi masyarakat yang hadir di TPS mencapai 63% dan masyarakat yang golput yaitu sebesar 37%.

Perbandingan jumlah suara yang tidak digunakan di kecamatan tunjungan pada saat pilkada dan pilgub sangat signifikan. Pada saat pilkada angka golput mencapai 9.099 suara dan pada saat pilkada mencapai 14.944 suara. Di kecamatan cepu, jumlah suara yang golput pada saat pilkada yaitu sebesar 18.200 dan pada saat pilgub sebesar 19.176 suara. Di kecamatan jiken juga terdapat selisih yang cukup banyak, yaitu pada saat pilkada berjumlah 8.996 suara sedangkan pada saat pilgub mencapai 12.565 suara. Di kecamatan sambong jumlah pemilih yang memilih untuk golput tidak begitu besar, yaitu 8164 suara pada saat pilkada dan 8417 suara pada saat pilgub.

Tabel 3

no	kecamatan	Jumlah golput pilkada 2015	Prosentase Golput pilkada 2015	Jumlah golput pilgub 2018	Golput pilgub 2018
1	KEDUNGTUBAN	13.584	29%	19635	43%
2	RANDUBLATUNG	20.330	32%	21045	35%
3	KRADENAN	9.842	30%	11743	36%
4	JATI	12.788	31%	12100	30%

Partisipasi masyarakat Kecamatan Kedungtuban dalam pilkada tahun 2015 mencapai 71% dan masyarakat yang golput mencapai 29%. Kemudian pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, partisipasi masyarakat hanya sebesar 57%, dan masyarakat yang memilih untuk golput sebesar 43%. Untuk kecamatan randublatung sendiri, partisipasi masyarakat pada saat pemilihan kepala daerah yakni sebesar 68% dan masyarakat yang memilih untuk golput sebesar 32%.

Untuk wilayah kecamatan kradenan, tingkat partisipasi masyarakat pada saat pemilihan bupati sebesar 70%, sedangkan yang memilih untuk golput yakni sebesar 30%. Pada saat pemilihan gubernur dan wakil gubernur, partisipasi masyarakat sebesar 64% dan masyarakat yang golput yakni sebesar 36%. Kemudian untuk wilayah kecamatan Jati, partisipasi masyarakat pada saat pilkada hanya sebesar 69% dan masyarakat yang golput sebesar 31%. Pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilih mencapai 70% dan angka golput hanya sebesar 30%.

Dalam pemilihan bupati dan wakil bupati, angka golput di kecamatan kedungtuban sebesar 13.584 suara dan pada saat pilgub mencapai 19.635. kemudian kecamatan randublatung jumlah suara yang tidak dicoblos saat pilkada sebesar 20.330 dan jumlah golput pada saat pilgub mencapai 21045 suara. Untuk kecamatan kradenan juga tidak jauh berbeda dengan kecamatan lain, golput pada saat pilkada yaitu sebesar 9.842 suara dan pada saat pilgub mencapai 11.743 suara. Akan tetapi di kecamatan jati ada sedikit hal yang berbeda, dimana jumlah golput saat pilgub tahun 2018 lebih kecil dibandingkan dengan pilkada tahun 2015.

Tabel 4

no	kecamatan	Jumlah golput pilkada 2015	Prosentase Golput pilkada 2015	Jumlah golput pilgub 2018	Golput pilgub 2018
1	NGAWEN	14.467	30%	19177	40%
2	KUNDURAN	15.077	28%	19477	37%
3	TODANAN	13.972	27%	19603	39%
4	JAPAH	7.291	26%	11093	39%

Partisipasi masyarakat dalam pemilihan bupati dan wakil bupati di Kecamatan Ngawen mencapai 70%, dan masyarakat yang golput yakni sebesar 30%. Untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, di kecamatan ini tingkat partisipasi masyarakat yakni sebesar 60%. Dan masyarakat yang memilih untuk golput yakni sebesar 40%. Kemudian di kecamatan Kunduran, tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan bupati sebesar 73%, dan masyarakat yang golput mencapai 27%. Dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, tingkat partisipasi masyarakat yakni sebesar 63% , dan tingkat masyarakat yang memilih golput yaitu sebesar 37%.

Di Kecamatan Todanan, tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan bupati dan wakil bupati mencapai 73% dan masyarakat yang golput yakni sebesar 27%. Partisipasi masyarakat pada saat pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Kecamatan Todanan ini mencapai 61% dan masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya yakni sebesar 39%. Kemudian untuk Kecamatan Japah, tingkat partisipasi masyarakat pada saat pemilihan bupati yakni sebesar 74% dan masyarakat yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya yakni sebesar 26%. Kemudian dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, tingkat partisipasi

masyarakat yakni sebesar 61% dan masyarakat yang memilih untuk golput sebesar 39%.

Partisipasi masyarakat dalam pemilihan bupati dan wakil bupati di Kecamatan Ngawen masih lebih baik jika dibandingkan dengan pemilihan gubernur di tahun 2018. Dimana pada saat pilkada angka golput sebesar 14.467 dan pada pilgub mencapai 19.117 suara. Kecamatan Kunduran juga tidak jauh berbeda dengan kecamatan lainnya, yaitu pemilih yang memilih golput pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur lebih besar dibandingkan dengan pemilihan bupati dan wakil bupati. Jumlah pemilih di Kecamatan Todanan pada saat pemilihan bupati juga jauh lebih besar jika dibandingkan dengan pemilih di pemilihan gubernur jawa tengah tahun 2018. Kemudian untuk kecamatan jajah, terdapat jarak yang begitu besar antara jumlah pemilih yang golput, dimana pemilih yang golput di pemilihan gubernur jauh lebih besar yakni sebesar 11.093 suara.

“ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat enggan untuk datang ke TPS, diantaranya banyak pemilih yang diluar kota untuk bekerja. Kemudian calon yang tidak familiar dengan orang blora juga mempengaruhi minat masyarakat, sehingga tingkat emosional masyarakat juga berkurang ” (hasil wawancara Ketua KPU Kab. Blora, 10 desember 2018).

Dari penjelasan yang dikemukakan oleh ketua KPU Kabupaten Kabupaten Blora, Muhammad Hamdun, bahwasanya banyaknya pekerja yang asalnya dari blora kemudian merantau dan tidak kembali ke kampung halaman untuk melakukan pencoblosan. Masyarakat lebih memilih untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ketimbang datang ke tps. Masyarakat yang penulis wawancara juga menuturkan bahwa banyak saudara dari responden yang keluar kota untuk bekerja

dan tidak kembali, dan rata-rata orang yang merantau akan pulang pada saat hari raya idul fitri atau idul adha.

Hal ini diperjelas dengan pendapat dari :

“Rendahnya partisipasi masyarakat juga dipengaruhi oleh medan yang berat khususnya di kecamatan randublatung. Berhubung pilgub dilakukan setelah lebaran, orang yang datang ke kampung halaman sekaligus mengajak saudaranya yang lain untuk merantau sehingga dapat berkurang dan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat.” Wawancara dengan pak Mugi, ketua PPK Randublatung, pada tanggal 13 Desember 2018.

Pelaksanaan pemilihan gubernur jawa tengah menurut beberapa responden juga tidak tepat. Hal ini terjadi karena di daerah kecamatan Kradenan dan kecamatan Kedungtuban pada bulan Juni tahun 2018 sedang dalam masa panen raya dan masyarakat tidak datang ke tps dan lebih memilih pergi ke sawah untuk memanen hasil pertanian mereka. Kemudian banyak juga yang mengemukakan bahwa masyarakat tidak mengenal calon gubernur maupun calon wakil gubernur. Responden juga menuturkan bahwa dari pilgub ke pilgub yang dirasakan juga sama saja, tidak ada perubahan yang berarti bagi kehidupan masyarakat.

Pendidikan politik masyarakat juga masih tergolong cukup rendah, karena masyarakat blora sebagian besar bekerja sebagai petani. Dalam hal ini, KPU sebagai lembaga yang secara langsung bergerak sebagai penyelenggara pemilu berkewajiban untuk melakukan pendidikan politik.

Keikutsertaan dan pengalaman masyarakat di pedesaan dalam berorganisasi juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pencoblosan pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada tahun 2018. Orang yang berpengalaman dalam organisasi kemasyarakatan, keagamaan, hingga politik pasti

memiliki kesadaran bahwa suara mereka sangat berguna untuk melakukan perubahan di masa yang akan datang. Apabila masyarakat sudah memiliki kesadaran bahwa satu suara mereka sangat berguna untuk proses demokrasi dan dapat melakukan perubahan, maka sistem demokrasi di Indonesia akan berjalan dengan baik dan uang yang dikeluarkan pemerintah untuk melakukan pemilu tidak terbuang dengan percuma.

3.2 Faktor yang mempengaruhi pandangan terhadap obyek politik pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur

Gabriel A. Almond dan Sidney Verba mengaitkan budaya politik dengan orientasi dan sikap politik seseorang terhadap sistem politik dan bagian-bagiannya yang lain serta sikap terhadap peranan kita sendiri dalam sistem politik. Mereka membagi komponen dalam melihat pandangan terhadap objek politik dibagi menjadi 3, yaitu:

Komponen Kognitif, yaitu kemampuan yang menyangkut tingkat pengetahuan dan pemahaman serta kepercayaan dan keyakinan seorang atau masyarakat terhadap jalannya sistem politik dan atributnya, seperti tokoh-tokoh pemerintahan, kebijaksanaan yang mereka ambil, atau mengenai simbol-simbol yang dimiliki oleh sistem politiknya, seperti ibukota negara, lambang negara, kepala negara, batas-batas negara, mata uang yang dipakai, dan lain sebagainya.

“saya bekerja di Semarang, dan pada saat pilgub kebetulan saya libur dan saya dirumah, dan bisa ikut memilih ke TPS” wawancara dengan Mas Fakhruddin Karmani, tokoh masyarakat dan pemilik yayasan di Kradenan, pada tanggal 14 Desember 2018.

Dalam konteks ini, masyarakat yang memiliki pendidikan yang baik dan terbiasa dalam organisasi, lebih cenderung untuk dapat menggunakan hak pilihnya dengan bijak. Meskipun pemilu bukan merupakan pemilu yang wajib, melainkan pemilu hak setiap individu, akan tetapi apabila seseorang atau anggota masyarakat yang memiliki pengalaman yang lebih, maka ia akan memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Dalam proses pemungutan suara seperti pada pemilihan gubernur ini, satu suara pun sangat berarti untuk melakukan perubahan, baik itu perubahan yang secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat, maupun yang tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat.

Komponen Afektif, yaitu menyangkut perasaan seorang warga negara terhadap sistem politik dan peranan yang dapat membuatnya menerima atau menolak sistem politik itu.

“rumah saya disini, sejauh yang saya ketahui saat ini sistem politik di Indonesia sudah baik, yaitu demokrasi. Akan tetapi demokrasi juga tidak lepas dari perebutan kekuasaan yang terkadang dapat menimbulkan perpecahan” wawancara pada tanggal 14 Desember 2018, dengan mas Ipung, guru MTS di kradenan.

Percaturan politik di Indonesia mulai dari zaman reformasi, hingga orde baru banyak meninggalkan cerita yang mungkin banyak dirasakan oleh warga negara Indonesia. Pemilu demi pemilu yang dilaksanakan untuk memilih pemimpin yang nantinya diharapkan untuk dapat merubah kehidupan agar menjadi lebih baik. Begitu pula dengan pemilihan gubernur, masyarakat sangat mengharap adanya perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya yaitu dengan ikut memilih seorang pemimpin dengan cara pemilihan umum. Dengan ikut

memilih, otomatis masyarakat ikut andil dalam melakukan perubahan dan secara tidak langsung ikut dalam proses pembangunan.

3.3 Faktor yang mempengaruhi pemilihan umum.

Dedi Mulyadi memberikan pengertian mengenai Pemilu yaitu sebuah mekanisme politik modern untuk menginternalisasikan aspirasi, espektisi dan kepercayaan (truss) masyarakat dalam menentukan dan memilih pemimpinnya di lembaga legislatif maupun eksekutif (pusat dan daerah) secara langsung.

Adapun fungsi pokok dari Pemilu adalah:

- a. Fungsi keterwakilan (representative ness) dalam arti kelompok-kelompok masyarakat memiliki perwakilan ditinjau dari aspek geografis, fungsional, dan deskriptif.
- b. Fungsi integrasi, dalam arti terciptanya penerimaan partai terhadap partai lain dan masyarakat terhadap partai.
- c. Fungsi mayoritas, yang mencakup besar untuk menjamin stabilitas pemerintah dan kemampuannya untuk memerintah.

Lebih jauh dijelaskan oleh Jimly Assiddiqie yang dipilih melalui pemilihan umum, banyak yang bisa dipilih dari sistem ini, salah satunya yang dipilih adalah wakil rakyat. Akan tetapi, tidak hanya wakil rakyat saja yang dipilih melalui pemilihan umum, para pemimpin di lingkungan eksekutif juga dipilih melalui pemilihan umum. Dalam penelitian ini, penulis meneliti terkait penelitian di lingkungan eksekutif, yaitu pemilihan gubernur dan wakil gubernur, yang bertujuan untuk menentukan gubernur baru yang akan memimpin Jawa

Tengah selama lima tahun kedepan. Pemimpin dalam hal ini gubernur dan wakil gubernur dipilih langsung oleh masyarakat yang nantinya masyarakat dapat menggantungkan harapannya kepada pemimpin yang baru agar nantinya dapat tercipta masyarakat yang memiliki kehidupan layak, infrastruktur mudah dan akses kesehatan yang memadai.

Menurut Jimly Asshiddiqie pemilu merupakan mekanisme penentuan pendapat rakyat melalui sistem yang bersifat langsung. Dasim Budiman Syah mendefinisikan Pemilu sebagai suatu proses di mana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Sedangkan Paimin Napitupala memberikan pengertian pemilu adalah sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasikan inspirasi dan kepentingan warga negara dalam proses memilih sebagian rakyat menjadi pemimpin pemerintah.

Lebih jauh diuraikan oleh beliau bahwa pemilu merupakan salah satu bentuk sistem yang bekerja secara struktural dan elektual progres untuk menciptakan suatu representatif government yang didalamnya terdapat berbagai organisasi dan pranata yang sangat baik dari infrastruktur pemerintah maupun suprastruktur pemerintah dan mutlak sangat membutuhkan kemampuan yang sangat baik agar nantinya dapat tercapai kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Pemerintah terendah diajak kampanye, menggandeng tokoh masyarakat, agama, pemimpin kelompok, 2018 banyak anggaran sosialisasi ke ormas, seperti nu, muhammadiyah, ippnu, pmii, hmi, kelompok adat samin, pecinta burung, club motor, diberikan stimulan anggaran untuk melakukan kampanye secara mandiri, ini merupakan sebuah upaya untuk menggerakkan pemilih agar datang

ke tps” wawancara pada tanggal 7 Desember 2018, dengan pak Hamdun, Ketua KPU Blora.

Dari pendapat yang dijabarkan oleh ketua KPU, dari proses sosialisasi KPU sudah melakukannya dengan baik. Kemudian penulis melakukan wawancara dengan masyarakat terkait dengan sosialisasi yang telah dilakukan oleh KPU, PPK, maupun PPS. PPK merupakan lembaga yang menyelenggarakan pemilihan di tingkat kecamatan, dan kinerjanya diawasi oleh panwascam, kemudian PPS merupakan lembaga yang melakukan tugas untuk melakukan pemilihan di tingkat desa. Tidak hanya melakukan proses pemilihan, akan tetapi PPK dan PPS juga ikut andil dalam proses sosialisasi.

“terkait dengan sosialisasi, diadakan nonton bareng debat gubernur dan wakil gubernur di kantor kecamatan, dan di hadiri oleh sekitar 50 tokoh masyarakat di kecamatan Tunjungan” wawancara pada tanggal 18 Desember, dengan Pak Suwardi, anggota PPK kecamatan Tunjungan.

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan warga di kecamatan Tunjungan, para responden berpendapat bahwa benar PPK dan PPS sudah melakukan sosialisasi di wilayah mereka masing-masing. Sosialisasi yang dilakukan PPS menasar anggota masyarakat yang sedang melakukan kegiatan seperti arisan ibu-ibu PKK, ataupun pengajian yang dilakukan oleh bapak-bapak.

“Tingkat kecamatan melakukan sosialisasi melalui hiburan masyarakat seperti wayang, pengajian, dan orgen, kemudian KPU juga mendatangi sekolah agar pemilih pemula dapat memilih dan datang ke tps” wawancara pada tanggal 7 Desember 2018, dengan pak Hamdun, Ketua KPU Blora.

Di setiap kecamatan, hiburan dan bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh KPU juga beragam. Untuk daerah Cepu, dalam rangka sosialisasi yang bertujuan untuk menjaring partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS yaitu dengan diadakannya pentas wayang kulit semalam suntuk. Dalam wayangan ini, sosialisasi diadakan langsung oleh KPU Provinsi Jawa Tengah. Untuk kecamatan Kradenan, sosialisasi dilakukan dengan cara hiburan rakyat berupa orgen tunggal. Sosialisasi ini dilaksanakan oleh PPK kecamatan Kradenan dan diadakan di depan kantor kecamatan Kradenan.

3.4 Faktor yang mempengaruhi hubungan timbal balik politik

Patronase dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk pembagian keuntungan yang dilakukan oleh politisi untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan baik itu dilakukan secara pribadi maupun dilakukan secara kelompok, dari individu ke individu, kemudian dari individu ke antar kelompok dan dari kelompok ke kelompok yang lainnya. Kegiatan ini juga dapat dilakukan oleh para pegiat kampanye, dilakukan oleh pekerja, dan hal ini dilakukan untuk mendapatkan dukungan politik dari mereka (Shefter, 1977). Patronase dapat dikategorikan sebagai pemberian uang imbalan secara tunai, dapat berupa barang seperti sembako, dapat juga berupa jasa, dan barang ekonomi lainnya, seperti jabatan, pekerjaan, di sebuah kantor, kemudian pembagian proyek pembangunan. Hal ini dapat dilakukan oleh politisi untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Konsep patronase juga dapat dikategorikan sebagai pemberian uang kepada masyarakat dari uang pribadi

maupun dana publik yang berupa pembagian proyek pekerjaan seperti pembuatan jalan raya, pembuatan waduk, dan infrastruktur penunjang lainnya.

“Terkait dengan money politik, selalu menjadi diskusi, iya tidaknya harus dibuktikan. Yang memberi, yang menerima, dan aktifitas transaksi pemberian uang adalah 0%, Yang terjadi adalah asumsi yang ada di masyarakat terkait dengan money politik yang hanya sekedar sebatas informasi dari lisan ke lisan dan selalu muncul dan bukti nya belum pernah ditemui dalam pilgub tahun 2018”. Wawancara dengan Bawaslu pada tanggal 21 Desember 2018

Isu money politik memang selalu menjadi hal sangat menarik saat menjelang dan setelah terjadinya pemilihan umum, pilkada, pileg, maupun pilgub. Masyarakat masih beranggapan bahwa yang memberikan uang maka itulah yang bersungguh sungguh untuk menjadi kepala di pemerintahan. Padahal yang terjadi sebenarnya apabila calon memberikan uang, maka tanggung jawab calon yang terpilih nantinya sudah selesai, karena suara mereka sudah dibeli oleh calon tersebut.

Pada saat penulis melakukan penelitian dan terjun di lapangan, penulis menemukan banyak asumsi bahwa masyarakat akan memilih jika mereka diberikan uang. Sosialisasi dari KPU, Parpol, dan media massa lainnya seperti tidak ada gunanya apabila suara masyarakat masih ditentukan oleh money politik. Kesadaran politik masyarakat harus secara sadar terbentuk dari diri pribadi masing-masing dan harus memiliki tanggung jawab sendiri terhadap suara yang diberikan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

Dikutip dari Tempo.co, pada hari senin tanggal 19 Februari 2018, calon gubernur Sudirman Said melakukan lawatan ke Kecamatan Cepu untuk melakukan proses kampanye. Dalam kampanye nya, Sudirman lebih memilih untuk bertemu dengan petani dan sedikit menyinggung soal kartu tani. Kemudian, pada tanggal 04 April, calon gubernur Ganjar Pranowo juga melakukan lawatannya ke kabupatennya, lebih tepatnya di kecamatan Blora. Dalam lawatannya, Ganjar lebih berfokus pada pedagang tumpah di pasar blora dan petani tembakau. Dari kunjungan kedua calon gubernur tersebut, di kecamatan cepu angka pemilih cukup besar mencapai 66%, dan di kecamatan Blora mencapai 67%. Dengan kata lain, dengan kedatangan calon gubernur, para masyarakat lebih antusias untuk datang dan berpartisipasi dibandingkan dengan daerah yang tidak di datangi oleh calon gubernur.

Tidak ikutnya masyarakat dalam memilih atau yang biasa disebut dengan golput dapat ditinjau dari berbagai faktor, dan faktor yang mempengaruhi pilihan masyarakat begitu luas. Hal ini disampaikan oleh Eep Saifullah Fatah dalam (Wibawa, 2014) yang membagi jenis golput menjadi tiga macam. Yang pertama adalah golput teknis, yaitu masyarakat enggan untuk memilih dikarenakan karena sakit, sehingga tidak dapat mengikuti proses pemilihan umum. Kemudian yang kedua adalah golput politis. Yang dimaksud dengan golput politis adalah masyarakat secara hati nurani tidak memiliki pilihan dan tidak memiliki kandidat sendiri sehingga mereka memilih untuk golput. Yang ketiga adalah golput ideologis, dimana masyarakat tidak percaya dengan sistem demokrasi karena terkait dengan peraturan agamamaupun alasan politik ideologinya.

“Untuk di kecamatan kradenan, untuk mensuplai kotak suara dan surat suara harus melewati kabupaten ngawi karena infrastruktur jalan yang sangat buruk dan medan yang cukup berat” wawancara pada tanggal 14 desember 2018, dengan pak Wahyu Eko, Ketua PPK Kecamatan Kradenan.

Alasan-alasan masyarakat memilih untuk golput dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu:

1. Alasan teknis administratif

Yang dimaksud dengan alasan teknis administratif yaitu seseorang yang tidak dapat memilih dikarenakan terganjal dengan proses pendaftaran dan kemudian tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Hal ini disebabkan oleh kesalahan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Pada umumnya pemilih harus terdaftar dan masuk dalam DPT, apabila sistem pendaftaran sangat rumit, hal ini juga dapat mengurangi minat masyarakat untuk datang ke TPS.

Dalam kasus ini, untuk DPT secara keseluruhan sudah baik. Melalui rekap data yang dilakukan mulai dari tingkat PPS sampai tingkat KPU Kabupaten Blora sudah tidak ada masalah. Hal ini diperjelas oleh hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan ketua KPU dan anggota PPK kecamatan Tunjungan.

“kalalu dari DPT semua aman, dan dalam proses verifikasi kami lakukan dengan baik. Tugas yang kami lakukan harus kami lakukan dengan baik agar semua masyarakat yang masuk kriteria pemilih dapat masuk ke dalam DPT secara akurat” wawancara oleh pak suwardi, PPK Tunjungan, pada tanggal 18 Desember 2018.

Terkait dengan faktor administrative, pihak KPU dalam hal ini tidak menemukan adanya kesalahan dalam daftar pemilih tetap. Seperti yang dikemukakan oleh KPU Blora, dalam hal pencocokan DPT pihaknya telah berkali-kali melakukan pencocokan agar tidak terjadi kesalahan dan nantinya tidak

ditemukan masalah yang serupa yaitu terkait dengan daftar pemilih tetap dalam pemilihan legislatif, maupun pemilihan eksekutif.

2. Faktor politis

Yang dimaksud dengan Golput politis adalah seseorang yang merasa bahwa dia tidak memiliki calon kandidat bahkan tidak memiliki kepercayaan bahwa nantinya pemilihan umum akan membawa perubahan yang nyata bagi kehidupan di masa yang akan datang. Pemilih tidak memiliki pilihan dari salah satu kandidat karena tidak sesuai dengan harapannya sehingga dia tidak mau mencoblos. Pemilih tidak percaya formalisme sekalipun bersahabat dengan elitisme dan tak percaya formalisme sekaligus elitisme. Biasanya mereka anti terhadap hal-hal formal, seperti partai, pemilu, parlemen, dan pemerintah). Pemilih yang tidak mau memilih karena menganggap demokratisasi sebagai arena permainan elite menggunakan arena dan kendaraan formal. Mereka tidak percaya pemilu dan pilihan mereka membawa perubahan terhadap kehidupan mereka.

“calon gubernur dan wakil gubernur nya cuma itu-itu saja dan kalau kami ikut memilih pun juga tidak ada perubahan yang dapat kami rasakan, warga di daerah sini juga tidak tau calon gubernur yang baru” wawancara dengan mas Ipung, guru di Kradenan pada tanggal 14 Desember 2018.

Masyarakat di daerah pedesaan tidak memiliki pilihan karena mereka menganggap bahwa mereka tidak punya pilihan calon yang tepat pada saat pemilihan kepala daerah ini. Masyarakat berpendapat bahwa mereka tidak memiliki

pilihan sehingga mereka memutuskan untuk tidak datang ke tempat pemungutan suara dan juga tidak memilih calon pemimpinnya sendiri.

3. Politik uang

Menurut Susno Duaji, yang dikutip dari Tirto.id, menjelaskan bahwa politik uang dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah berkaitan dengan pembelian kursi jabatan. Yang kedua adalah politik uang yang terkait dengan hukum, yaitu seseorang melakukan politik uang bertujuan agar orang tersebut dapat melewati berbagai masalah hukum yang menjeratnya. Kemudian politik uang yang ketiga adalah membeli suara rakyat. Membeli suara rakyat untuk dapat duduk di kursi eksekutif maupun legislatif sudah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat.

“terkait dengan money politik, kami dari bawaslu dalam pemilihan gubernur kemarin tidak menemukan bukti secara nyata, bukti fisik berupa uang dan transaksi dari tim sukses juga tidak kami temukan” hasil wawancara dengan Pak Edi, anggota Bawaslu Kabupaten Blora, pada tanggal 21 Desember 2018

Yang terjadi di masyarakat setelah peneliti terjun ke lapangan adalah masyarakat tidak menerima uang sebelum pencoblosan dilakukan. Hal ini justru menjadi salah satu penyebab masyarakat enggan untuk datang dan memilih pemimpin mereka. Disatu sisi tidak diberikannya uang kepada masyarakat adalah salah satu bentuk demokrasi yang baik, akan tetapi dari masyarakatnya sendiri tidak mau datang ke TPS karena tidak diberikan uang.

“sepeserpun kami tidak menerima uang dari kandidat calon kandidat nomor 1 maupun kandidat dari calon nomor urut 2, mungkin cakupan pemilihannya satu provinsi, jadi kandidat juga tidak memberikan uang kepada pemilih” wawancara dengan Fakhrudin Karmani, pemilik salah satu yayasan di Kecamatan Kradenan, pada tanggal 14 Desember 2018

Dari hasil wawancara penulis dengan para narasumber, memang benar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur baik dari pasangan calon 1 maupun pasangan calon 2 tidak memberikan uang insentif kepada masyarakat. Akan tetapi masyarakat masih menginginkan uang agar mereka mau memilih dan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Tidak dapat dipungkiri bahwa ini menjadi salah satu masalah yang sangat serius dalam perjalanan demokrasi karena masyarakat sendiri masih berpedoman bahwa siapa yang memberikan uang kepada kami, maka ia yang akan kami pilih.

2. Pekerjaan

Terkait dengan masalah masyarakat yang tidak datang ke TPS, yang lebih cocok untuk dijadikan alasan untuk tidak datang ke TPS adalah banyaknya masyarakat yang merantau ke daerah lain untuk bekerja sehingga tidak dapat pulang ke kampung halaman dan tidak dapat juga untuk mencoblos ke TPS.

“kami lebih baik mencari nafkah mas, kebutuhan sehari hari semakin lama semakin lama. Saya memilih maupun tidak memilih juga sama saja” wawancara dengan pak Gimán, warga masyarakat Randublatung, pada tanggal 13 Desember 2018

Hal ini sangat berkaitan dengan alasan kenapa masyarakat untuk tidak hadir karena alasan pekerjaan. Masyarakat khususnya di pedesaan rata-rata bekerja secara serabutan dan tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Alasan yang dikemukakan oleh beberapa masyarakat juga sama dengan apa yang dikemukakan oleh pak Gimán, yaitu warga masyarakat di Kecamatan Randublatung sebagian besar memilih untuk bekerja atau hanya sekedar untuk menyambung hidup. Kemudian bisa juga masyarakat tidak memilih karena malas untuk pergi ke TPS dan takut salah dalam pencoblosan sehingga masyarakat enggan untuk memilih.

Selanjutnya yaaitu masyarakat tidak memiliki waktu untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara dan memilih untuk tidak hadir pada saat pemilihan karena bekerja, ke luar kota, bahkan ke luar negeri.

3.5 Faktor yang mempengaruhi relasi politik

Klientalisme tidak sama dengan patronase, hal ini dikarenakan dalam pengertian klientalisme secara harfiah memiliki arti bahwa seseorang tersebut merupakan pengikut yang cukup setia terhadap suatu calon tertentu.

Klientalisme yaitu merupakan sebuah jaringan antara beberapa orang yang memiliki jaringan, hubungan ekonomi, hubungan politik, yang didalamnya mengandung elemen iterasi (Aspinall, 2015). Kemudian klientalisme juga sering disebut dengan hubungan antara patron dan klien dan bersifat personal. Maka kemudian dapat dipastikan bahwa klientalisme merupakan faham yang menjelaskan mengenai relasi dan jaringan manusia di dalam masyarakat. Dalam kajian ilmu politik, klientalisme juga dapat diartikan sebagai suatu jaringan yang dikuasai oleh patron yang bertujuan untuk menekan atau mengintervensi kliennya. Dalam klientalisme sendiri dapat memiliki beberapa elemen, diantaranya yaitu iterasi, asimetri, dan resiprositas.

“Dalam Pilgub tahun 2018, tingkat apatisme masyarakat selalu tinggi, pemilu ke pemilu, masyarakat melontarkan tidak ada perubahan sehingga masyarakat tdk mau datang ke tps sehingga ini menjadi hambatan dalam pilgub” wawancara oleh Pak Hamdun, ketua KPU Blora, pada tanggal 7 Desember 2018.

Dalam hubungannya dalam relasi politik, masyarakat lebih menginginkan adanya perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Basis suara masyarakat berada pada lingkungan terendah, seperti RT dan RW, sehingga calon

gubernur dan wakil gubernur tidak dapat menjangkau secara langsung para masyarakat, sehingga relasi secara langsung tidak dapat terjalin. Yang ditunggu oleh masyarakat hanyalah janji politik yang harus dilakukan melalui visi dan misi gubernur yang telah terpilih.